

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
TENTANG PENGUJIAN FORMIL UNDANG-UNDANG
NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA
TERHADAP UNDANG - UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

TAHUN 1945

(Studi Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020)

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister
(M.H) Pada Program Studi (S2) Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Islam Sumatera Utara

OLEH:

BONAR PASARIBU

NPM: 71200123162

Program Studi/Konsentrasi: Ilmu Hukum /Hukum Tata Negara/Han



PROGRAM STUDI (S-2) MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA

MEDAN

2024

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG
PENGUJIAN FORMIL UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG CIPTA KERJA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
(Studi Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020)**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister
(M.H) Pada Program Studi (S2) Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Islam Sumatera Utara

OLEH:

BONAR PASARIBU
NPM: 71200123162

Program Studi/Konsentrasi: Ilmu Hukum /Hukum Tata Negara/Han

Medan, 24 September 2024

Telah Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

(Prof. Dr. Marzuki, S.H., M.Hum)

(Dr. Mukidi, S.H.,M.H)

KATA PENGANTAR

Pertama kali penulis ingin memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya pada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tesis ini. Shalawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. beserta para keluarga, sahabat dan umatnya, Amin.

Tesis ini ditulis dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum di Program Pascasarjana Universitas Islam Sumatera Utara. Penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan kontribusi dalam penyelesaian karya ilmiah ini. Secara khusus pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Marzuki, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing I yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama penyusunan Tesis ini dari awal hingga Tesis ini dapat diselesaikan.
2. Bapak Dr. Mukidi, S.H., M.H selaku dosen pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama penyusunan Tesis ini dari awal hingga Tesis ini dapat diselesaikan.
3. Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Bapak Prof. Dr. Mustamam, S.Ag., M.A beserta Seluruh Dosen dan staff Universitas Islam Sumatera Utara khususnya Program Studi Ilmu Hukum.
4. Terkhusus untuk kedua orang tua yang sangat disayangi, Alm. Papa Tercinta Rahusin Pasaribu dan Ibunda tercinta Nurhaina serta kakak dan adik-adikku semua. Terima kasih atas kasihsayang, didikan, nasihat dan semangat untuk menuntut ilmu serta semua hal yang kalian tanamkan kepada Saya. Rasa sayang yang teramat sangat dari kalian selalu menjadi motivasi bagi Saya untuk dapat terus semangat dan berusaha menjadi pribadi yang berguna bagi semua orang.
5. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan Tesis ini yang tidak dapat ditulis satu persatu. Semoga amal ibadahnya dibalas oleh Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Tesis ini masih banyak kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan Tesis ini. Akhir kata, penulis berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi diri penulis pribadi dan para pembaca.

Penulis

Bonar Pasaribu

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

ABSTRAK

DAFTAR ISI..... i

BAB I 1

PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang..... 1

B. Rumusan Masalah 7

C. Tujuan penelitian..... 7

D. Manfaat penelitian..... 8

E. Kerangka teori Dan Konsep 8

F. Keaslian Penelitian..... 42

G. Metode Penelitian 45

1. Spesifikasi Penelitian..... 45

2. Metode pendekatan 46

3. Objek penelitian 46

4. Alat Pengumpulan Data 46

5. Proses Pengumpulan Dan Pengambilan Data 47

6. Analisa Data 48

BAB II 51

APAKAH MEKANISME PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR
15 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN SUDAH SESUAI DENGAN AMANAT UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945	51
A. Mekanisme Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011	51
B. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.....	62
C. Pembentukan Peraturan Perundang-Undang Harus Sesuai Dengan Amanat UUD NRI Tahun 1945	65
 BAB III	 68
DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TENTANG PENGUJIAN FORMIL UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945.....	68
A. Dasar Pertimbangan Hakim Tentang Pengujian Formil Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.....	68
B. Undang-Undang Cipta Kerja di Batalkan Mahkamah Konstitusi.....	105
 BAB IV	 109
BAGAIMANA IMPLIKASI APABILA TIDAK DIJALANKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 91/PUU-XVIII/2020	109
A. Implikasi Membingungkan Undang-Undang	109
B. Pendapat Ahli Terhadap Undang-Undang Cipta Kerja	110
C. Pendapat Ahli Terhadap Perpu Cipta Kerja Yang Telah Di Sahkan Menjadi Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2023	130
D. Analisis Penulis	134

BAB V 135

KESIMPULAN DAN SARAN 135

 A. Kesimpulan 135

 B. Saran 136

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Assiddiqie Jimly, Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945. Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, Denpasar, Bali, 14-18 Juli 2003.
-Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994).
-Model-Model Pengujian Konstitusional di Beberapa Negara, Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Abdul Latif,. *Fungsi Mahkamah Konstitusi (Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi)*. Yogyakarta. Kreasi Total Media, 2009
- Amos J. Peaslee, *Constitutions of Nations (Revised Third Edition)*
- Abdul Latif,. *Fungsi Mahkamah Konstitusi (Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi)*. Yogyakarta. Kreasi Total Media, 2009.
- A.M.W. Pranarka, *Sejarah Pemikiran tentang Pancasila* (Jakarta: CSIS, 1985)
- Budiardjo Miriam dan Ibrahim Ambong (Ed.), *Fungsi Legislatif Dalam Sistem Politik Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993).
-Mariam, 2007, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia Indonesia, Jakarta.
-Miriam, *Dasar- Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT Gramedia, 1980). British Commonwealth (London: Longmans, Green and Co, 195, cet. ke-5,).
- Dyzenhaus David, "The Gorgon Head of Power: Heller and Kelsen on the Rule of Law", dalam Peter C. Caldwell dan William E.Scheuerman, *From Liberal Democracy to Fascism* (Leiden: Humanities Press, Inc., 2000).
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002, cet. ke-2, edisi ke-3
- E.C.S Wade dan G. Godfrey Philips, *Constitutional Law, An Outline of the Law and Practice of the Constitution, Including Central and Local Government and the Constitutional Relations of the British Commonwealth* (London: Longmans, Green and Co, 195, cet. ke-5,).
- Fuadi Munir, *Teori-teori besar (Grand Teori) Dalam Hukum*, (Prananda Media Grup 2014).

- Fajar Mukti ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Farida Maria Indrarti, Kumpulan Tulisan A. Hamid Attamimi: "Gesetzgebungswissenschaft sebagai Salah Satu Upaya Menanggulangi Hutan Belantara Peraturan Perundang-undangan", (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021)
-Maria Indrarti, monograf dekonstruksi perundang-undangan indonesia: menggapai cita-cita ideal pembentukan peraturan perundang-undangan. Ihsanuddin, "Setahun Jokowi dan Pidatonya soal Omnibus Law RUU Cipta Kerja," Kompas.com, 20 Oktober 2020
- Hadjon Philipus M., 1998, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu,
- Kusnardi Moh. dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Fakultas Hukum UI, 1988).
- Kusnardi Moh. & Bintan R. Saragih, *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem UUD 1945* (Jakarta: PT Gramedia, 1994)
-Moh. & Bintan R. Saragih, *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem UUD 1945* (Jakarta: PT Gramedia, 1994).
- K.C. Wheare, *Modern Constitution* (London: Oxford University Press, 1975)
- Kluth Winfried, "Entwicklung und Perspektiven der Gesetzgebungswissenschaft", *Gesetzgebung: Rechtsetzung durch Parlamente und Verwaltungen sowie ihre gerichtliche Kontrolle*, Winfried Kluth & Gunter Krings, et. Al., (Germany: C.F. Muller, 2014),
- Martitah dan Hery Abduh. *Negara dan Negara Hukum. Materi Kuliah yang disampaikan pada perkuliahan Hukum Tata Negara. Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang*, 2010.
- MD Mahfud, 2009, *Konsritusi Dan Hukum Dalam Kontroversi Isu*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Marzuki Peter Mahmud, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Prenada Kencana Media Group.
- Muhadjir Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rakesarasin, 1996).
- Mertokusumo Sudikno, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2001.

- Mertokesumo Sudikno, , Teori Hukum, (Yogyakarta,2011, Universitas Atmajaya),
- Navia Patricio dan Julio Rios-Figueroa, "The Constitutional Adjudication Mosaic of Latin America", dalam Comparative Political Studies, Volume 38, Number 2, Maret 2005
- Projodikoro Wirjono, Asas-asas Hukum Tata Negara di Indonesia, Dian Rakyat, Jakarta
- Rasyidi Lilik dan Ira Thania Rasyidi, 2004, Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum, Bandung, PT. Citra Aditya Bhakti.
- Rato Dominikus, 2010, Filsafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum, Yogyakarta, Laskbang Pressindo.
- Rahardjo Satjipto, Ilmu Hukum (Bandung: Alumni, cet. ke-4, 1996)
- Salim Peter, The Contemporary English-Indonesia Dictionary (Jakarta: Modern English Press, 1985).
- Subekti R, Kekuasaan Mahkamah Agung RI (Bandung: Penerbit Alumni, 1980)..
- Soekanto Soejono, 1982, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press).
- Sudikno, Mertokesumo, Teori Hukum, (Yogyakarta, 2011, Universitas Atmajaya).
- Sri Soemantri M., Susunan Ketatanegaraan Menurut UUD 1945 dalam Ketatanegaraan Indonesia Dalam Kehidupan Politik Indonesia, Sinar Harapan, Jakarta, 1993.
- Simarmata Jorawati, "Pengujian Undang-Undang Secara Formil Oleh Mahkamah Konstitusi: Apakah Keniscayaan? (Perbandingan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XII/2014 Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009", Jurnal Legislasi Indonesia Vol.14 No.01-Maret 2017
- Thaib Dahlan, 2006, Teori Dan Hukum Konstitusi, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Yuliandri, Keterangan Ahli Perkara Uji Formil-Materil Undang-Undang Nomor 17Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Salinan Putusan MK Nomor 79/PUU-XII/2014

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Putusan Nomr:91/PUU-XVIII/2020

C. Karya Ilmiah, Jurnal

Farida Maria Indrati, monograf dekonstruksi perundang-undangan indonesia: menggapai cita-cita ideal pembentukan peraturan perundang-undangan Fadli Muhammad, "Pembentukan Undang-Undang Yang Mengikuti Perkembangan Masyarakat Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 15 No. 01 Maret 2018

Muhammad Fadli, "Pembentukan Undang-Undang Yang Mengikuti Perkembangan Masyarakat" Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 15 No. 01 - Maret 2018

Patricio Navia dan Julio Rios-Figueroa, "The Constitutional Adjudication Mosaic of Latin America", dalam Comparative Political Studies, Volume 38, Number 2, Maret 2005.

D. Internet

<https://donggala.bawaslu.go.id/detail/apa-tugas-dan-fungsi-mahkamah-konstitusi-kedudukan-kewenangan>

[https://www.uii.ac.id/dosen-iii-berikan-pandangan-mengenai-perppu-
ciptakerja](https://www.uii.ac.id/dosen-iii-berikan-pandangan-mengenai-perppu-ciptakerja) [https://www.ugm.
ac.id/id/berita/20175-pukat-ugm-sebut-
ruu-cipta-kerja](https://www.ugm.ac.id/id/berita/20175-pukat-ugm-sebut-ruu-cipta-kerja-bermasalah-dari-proses-hingga-substansi) bermasalah-dari-proses-hingga- substansi.

file:///C:/Users/Admin/Downloads/17038375765 Tahapan Pembentukan
PeraturanPerundang.pdf[http://www.bphn.go.id/data/documents/na_ruu
_revisi_uu_no._12_tahun__2011.pdf](http://www.bphn.go.id/data/documents/na_ruu_revisi_uu_no_12_tahun_2011.pdf)

<https://law.ui.ac.id/v3/tiga-guru-besar-ini-beri-masukan-soal-omnibus-law/>.